



PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LKPD

Candra Maulana[✉], Bestari Dwi Handayani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2015
Disetujui Oktober 2015
Dipublikasikan
November 2015

Keywords:
Size of Local Government;
Intergovernmental Revenue;
Regional Financial
Independence; Total
SKPDs; Number Legislative
Audit Findings; and
Mandatory Disclosure Level
LKPD

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik, kompleksitas dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2013 sebanyak 123 kabupaten/kota. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 78 laporan keuangan Kabupaten dan Kota. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran pemerintah daerah dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dan variabel intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan, sedangkan variabel kemandirian daerah, jumlah SKPD dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Variabel temuan audit sebaiknya tidak hanya diproksikan dengan jumlah temuan saja, karena hal ini dinilai tidak material. Penggunaan proksi nilai temuan dan kategori temuan akan lebih tepat dalam menentukan tingkat materialitas suatu temuan.

Abstract

This study aims to determine the effect of the characteristics, complexity and audit findings on the level of disclosure of Local Government Finance Report. The population in this study is the district / city governments in Java fiscal year 2013 as many as 123 districts / cities. The method used is purposive sampling. The number of samples used are 78 districts and the City's financial statements. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with SPSS 21. The results showed that in partial size and the size of the local government legislative positive effect on the level of disclosure and variable intergovernmental revenue negatively affect the level of disclosure, while the independent variable regions, the number of SKPD and the audit findings do not affect the level of disclosure. Variable audit findings should not only proxied by the number of findings, because it is considered not material. The use of proxy values the findings and the findings would be more appropriate categories in determining the level of materiality of a finding.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: candramaulana55@gmail.com

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan seperangkat prosedur atau proses yang diberlakukan dalam instansi pemerintahan untuk menciptakan harmoni pada pengelolaan dan akuntabilitas operasionalnya. Tata kelola pemerintah yang baik erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah mampu melaksanakan otonomi di daerahnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah mengubah sistem pelaksanaan pemerintah daerah, urusan pemerintah yang sebelumnya sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat kini sebagian besar urusan rumah tangga pemerintah ditangani oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih

Teori *Agency* adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang menggambarkan situasi dimana pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat Lane (2000) dalam Puspitasari (2013). Dalam teori ini pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) dengan tiga perbedaan. Perbedaan pertama, memasukkan variabel baru yaitu ukuran legislatif dan temuan audit. Kedua, obyek dari penelitian ini menggunakan Kota dan Kabupaten di Pulau Jawa sebagai sampel penelitian agar lebih fokus mengingat pada penelitian-penelitian sebelumnya yang

dilakukan Lesmana (2010) dan Syafitri (2012), Pulau Jawa tercatat memiliki rata-rata pengungkapan tertinggi dengan daerah-daerah lainnya sehingga dapat digunakan sebagai barometer daerah yang lain dalam kaitannya dengan pengungkapan LKPD. Ketiga, periode tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2013.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris pengaruh karakteristik pemerintah yang diprosikan dengan ukuran pemda, kemandirian daerah dan *intergovernmental revenue* serta kompleksitas pemerintah yang diprosikan dengan jumlah SKPD dan ukuran legislatif ditambah dengan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Pengembangan hipotesis penelitian ini diambil berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan LKPD.

Ukuran pemda yang dalam penelitian ini diprosikan dengan total aset merupakan sumber daya yang digunakan entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas. Semakin besar jumlah aset maka akan semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. penelitian Khasanah (2014) dan Susbiyani (2014) menemukan pengaruh positif antara *size* yang diprosikan dengan total aset terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

H₁ : Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari perbandingan antara PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan total pendapatan daerah (Imawan, 2014). Semakin tinggi kemandirian daerah menunjukkan semakin besarnya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah, hal tersebut menyebabkan besarnya tuntutan masyarakat akan tingkat pengungkapan yang lebih besar. Penelitian yang sebelumnya dilakukan Lesmana (2010) dan Liestiani (2012) menemukan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

H₂ : Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pemerintah daerah dengan *intergovernmental revenue* yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat untuk membiayai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah akan didorong untuk meningkatkan transparansi dana yang diterima dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *intergovernmental revenue* maka semakin besar pula tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Darmastuti (2010) menemukan adanya pengaruh positif antara *intergovernmental revenue* dengan tingkat pengungkapan LKPD

H₃ : *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Semakin kompleks pemerintahan dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar untuk membantu pembaca laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang dilakukan pemerintah. Jumlah SKPD

menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut melakukan kegiatannya. Semakin besar SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan.

H₄ : Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

DPRD bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui adanya pengawasan. Penelitian yang sebelumnya dilakukan Syafitri (2012) menemukan pengaruh positif antara ukuran legislatif dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

H₅ : Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

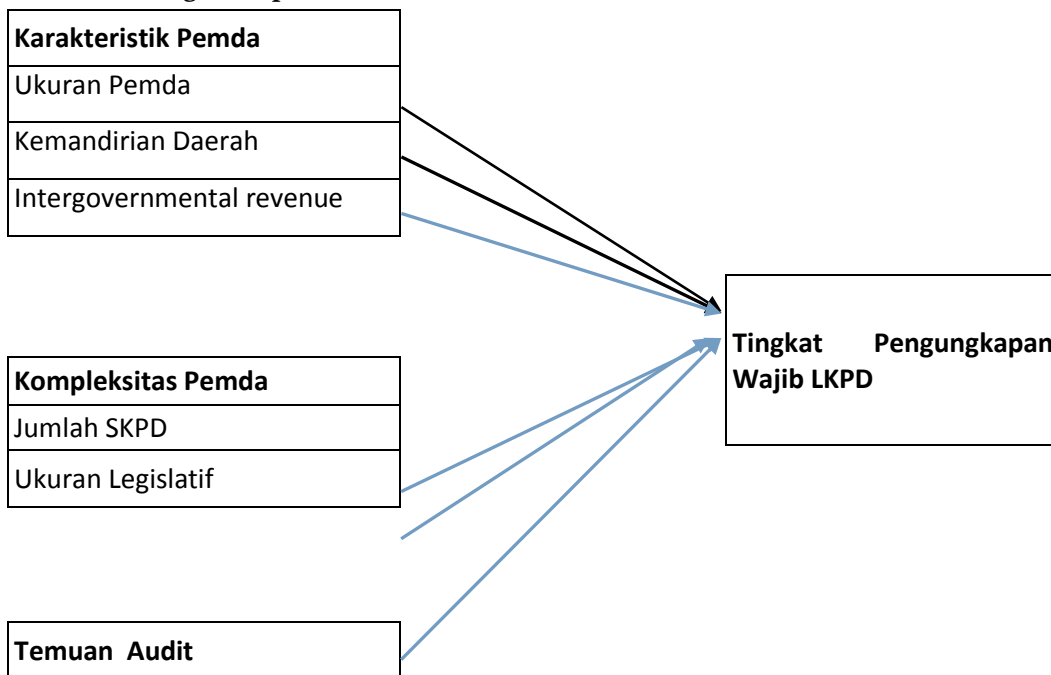
Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya temuan ini, maka BPK akan meminta melakukan korelasi dan meningkatkan pengungkapannya. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar pula jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Liestiani (2012) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh

secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

H₆ : Temuan Audit berpengaruh positif terhadap terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir dari penelitian ini digambarkan pada Gambar di bawah ini:

Usulan Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di

Pulau Jawa sebanyak 123 populasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah, kabupaten, dan kota pada tahun 2013. Teknik pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*. Hasil penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Keterangan	Jumlah
LKPD Kabupaten dan Kota tahun 2013	123
LKPD yang memenuhi kriteria : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota pada tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK. Memiliki data yang lengkap untuk pengukuran keseluruhan variabel: Menyediakan empat komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menyediakan data jumlah SKPD sebagai entitas akuntansi tahun 2013 pada LKPD atau Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada periode tahun 2013.	78
Total Sampel	78

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

VARIABEL PENELITIAN

Variabel Dependen

Tingkat Pengungkapan LKPD

Dalam mengukur tingkat pengungkapan, penelitian ini menggunakan metode indeks *scoring*. Indeks *scoring* yang dimaksud adalah dengan menggunakan skor pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 pada LKPD Kabupaten dan Kota. Skor 1 (satu)

diberikan pada tiap item pengungkapan yang diungkapkan dalam LKPD dan skor 0 (nol) untuk item pengungkapan yang tidak terdapat dalam LKPD tahun 2013. Dalam penelitian ini akan digunakan indeks pengungkapan dari penelitian Lesmana (2010), karena telah mewakili item-item wajib sesuai dengan PSAP Nomor 5 sampai dengan PSAP Nomor 9 ditambah 7 item pengungkapan umum dalam CaLK.. Pengukuran tingkat pengungkapan dalam penelitian ini menggunakan skala rasio.

Tabel 2

Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Pengukuran
Tingkat Pengungkapan LKPD (DISC)	Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pulau Jawa.	$\frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}} \times 100$
Ukuran Pemda	Ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset.	UKURAN = Ln Total Aset
Kemandirian Daerah	Menjelaskan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan.	$\text{Kemandirian} = \frac{PAD}{TPD}$
<i>Intergovernmental Revenue</i> (IRGROV)	Dana transfer dari pemerintah pusat	IRGROV = Total Pendapatan Transfer
Jumlah SKPD	Perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan barang.	SKPD = Jumlah SKPD
Ukuran Legislatif	Jumlah anggota DPRD.	LEG = Jumlah Anggota DPRD
Temuan Audit	Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Temuan = Jumlah Temuan

Sumber : Penelitian terdahulu

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi berupa data sekunder. Data tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI atas pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa pada tahun 2013 yang telah diaudit.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 21.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat Analisis Statistik Deskriptif sebagai berikut :

Tabel 3

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DISC	78	30,20	47,20	36,8090	3,51724
UKURAN	78	1192702794835,48	37450893488257,29	3976127742579,4640	4886041606509,82600
IRGROV	78	434688185289,00	3027346700154,00	1290572498929,5063	529944513693,17944
KEMANDIRIAN	78	,03	,53	,1455	,09043
SKPD	78	26,00	101,00	56,1667	15,50736
LEG	78	25,00	50,00	44,5513	7,77884
TEMUAN	78	2,00	15,00	7,2821	3,10382
Valid N (listwise)	78				

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan LKPD dilambangkan dengan DISC yang berdasarkan SAP. Hasil statistik deskriptif pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 78, menunjukkan bahwa rata-rata

tingkat pengungkapan LKPD kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2013 adalah sebesar 36,80%, yaitu rata-rata pemerintah daerah hanya mengungkapkan sebanyak 20 item dari total item yang harus diungkapkan sebanyak 53 item.

Tabel 4

Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	31,983	2,889		11,071	,000*
UKURAN	5,447E-013	,000	,618	3,315	,001*
KEMANDIRIAN	-,532	6,306	-,014	-,084	,933
IRGROV	-4,651E-012	,000	-,686	-3,285	,002*
SKPD	,008	,028	,034	,275	,784
LEG	,224	,078	,496	2,890	,005
TEMUAN	-,195	,125	-,172	-1,564	,122

a. Dependent Variable: DISC

*sign

1. Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung 3,315 dengan signifikansi 0,001. Nilai signifikansi untuk variabel ukuran pemda menunjukkan signifikansi di bawah 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung 3,315 > t-tabel sebesar 1,666 serta nilai koefisien menunjukkan tanda positif dan sesuai dengan hipotesis penelitian awal. Jadi H1 **diterima**, hasil ini juga didukung dengan penelitian Susbiyani (2014). Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan.

2. Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Uji t untuk H2 diperoleh hasil t-hitung -0,084 dengan signifikansi 0,933. Nilai signifikansi untuk variabel kemandirian daerah menunjukkan signifikansi di atas 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung -0,084 < t-tabel sebesar 1,666, artinya bahwa H2 **ditolak** sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil ini didukung oleh penelitian Hilmi (2011) dan Syafitri (2012) yang tidak menemukan pengaruh antara kemandirian daerah dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Uji t untuk H3 diperoleh hasil t-hitung -3,285 dengan signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi untuk variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan signifikansi di bawah 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung -3,285 < t-tabel sebesar 1,666, akan tetapi koefisien bernilai negatif yang artinya bahwa H3 **ditolak**. Hasil ini

didukung oleh penelitian Yulianingtyas (2010) dan Syafitri (2012) yang menemukan hubungan negatif antara *intergovernmental revenue* dan tingkat pengungkapan LKPD.

4. Pengaruh Jumlah SKPD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Uji t untuk H4 diperoleh hasil t-hitung 0,275 dengan signifikansi 0,784. Nilai signifikansi untuk variabel Jumlah SKPD menunjukkan signifikansi di atas 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung -1,058 < t-tabel sebesar 1,666, artinya bahwa H4 yang menyatakan ada pengaruh jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD **ditolak**.

5. Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Uji t untuk H5 diperoleh hasil t-hitung 2,890 dengan signifikansi 0,005. Nilai signifikansi untuk variabel ukuran legislatif menunjukkan signifikansi di bawah 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung 2,890 > t-tabel sebesar 1,666 serta nilai koefisien menunjukkan tanda positif dan sesuai dengan hipotesis penelitian awal. Jadi H5 **diterima** karena dapat berpengaruh positif ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

6. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Uji t untuk H6 diperoleh hasil t-hitung -1,564 dengan signifikansi 0,122. Nilai signifikansi untuk variabel temuan audit menunjukkan signifikansi di atas 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung -1,564 < t-tabel sebesar 1,666, artinya bahwa H6 **ditolak** sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan temuan audit terhadap

tingkat pengungkapan LKPD. Hasil ini didukung oleh penelitian Hilmi (2011) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran pemda dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, intergovernmental revenue berpengaruh negatif sedangkan kemandirian daerah, jumlah SKPD dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 1) Pemerintah daerah yang dijadikan sampel penelitian hanya menggunakan tahun 2013, Penggunaan waktu yang lebih panjang dapat memberikan gambaran dan perkembangan yang lebih terkini dari praktek pengungkapan laporan pemerintah daerah di Jawa, 2) Terbatasnya variabel yang digunakan.

Saran untuk peneliti selanjutnya: 1) Variabel temuan audit sebaiknya tidak hanya diprosikan dengan jumlah temuan saja, karena hal ini dinilai tidak material. Penggunaan proksi kualitas temuan akan lebih tepat dalam menentukan tingkat materialitas suatu temuan. 2) Untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tingkat pengungkapan wajib LKPD sebelum tahun 2015, diharapkan dapat meneliti tingkat pengungkapan wajib LKPD yang telah benar-benar menerapkan basis akrual saja berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sehingga penilaian terhadap tingkat pengungkapannya lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan*.
- Hilmi, Amiruddin Zul. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Journal of Accounting and Public Policy*. Hal: 1-26.
- Imawan, Riswanda. 2014. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. FE UNNES. Semarang.
- Khasanah, Nur L. 2014. *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang
- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. FE UNNES. Semarang.
- Lesmana, Sigit Indra. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Tesis. FE UNS. Surakarta.
- Puspitasari, Titus. 2013. *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Setyaningrum, D., dan Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 9 No. 2. Jakarta.
- Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh karakteristik Pemda terhadap kinerja keuangan Pemda*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Suhardjanto, D., dan Lesmana, S.I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Jurnal STIE Bank BPD Jateng* Vol. 6 No. 2. Surakarta.
- Syafitri, Febriyani. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Yulianingtyas, Rena R. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan*

Pemerintah Daerah. Skripsi. FE UNS.
Surakarta.

